

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia disebut sebagai negara agraris karena memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang pertanian karena kesuburan lahan dan sebagian besar masyarakatnya adalah petani. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian, namun hal tersebut masih belum mampu mengentaskan kemiskinan utamanya di daerah perdesaan. Jumlah penduduk miskin di perdesaan pada Maret tahun 2019 sejumlah 15,15 juta orang sedangkan di perkotaan sejumlah 9,99 juta orang (BPS, 2019c). Penyumbang kemiskinan terbesar di daerah perdesaan ialah sektor pertanian dimana mayoritas masyarakat di perdesaan bekerja pada sektor ini dan banyak pekerja yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Pembangunan Pertanian khususnya di negara berkembang seperti Indonesia tidak bisa terlepas dari wilayah perdesaan. Sebab, sebagian besar penduduk di Indonesia bermukim di perdesaan dan mayoritas masih dalam kondisi miskin. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan di negara berkembang dapat dilihat dari perkembangan di wilayah perdesaan sendiri. Bila mayoritas penduduk di perdesaan bisa melakukan mobilitas sosial-ekonomi (pembangunan), maka dapat disimpulkan pembangunan di negara berkembang telah menjangkau sebagian warga negaranya, demikian sebaliknya (Yustika, 2013). Wilayah perdesaan di negara berkembang biasanya dideskripsikan sebagai tempat bagi orang-orang bekerja di sektor pertanian (70% dari 20,65 juta jiwa), dimana masyarakat petani mencukupi hidup sendiri (swasembada) (Kementerian Pertanian, 2010).

Salah satu persoalan paling rumit di wilayah perdesaan adalah penyediaan modal. Bahkan, keterbatasan akses terhadap modal (kredit) diidentifikasi sebagai salah satu faktor penyebab kemiskinan. Ditambah lagi, fasilitasi bantuan modal yang diluncurkan pemerintah belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh petani. Hal ini disebabkan karena lembaga permodalan formal yang ditunjuk untuk menyalurkannya dirasakan tidak sepenuhnya berpihak kepada petani, bunga yang terlalu tinggi, jaminan persyaratan yang tidak bisa dipenuhi petani, proses pencairan yang memakan waktu sangat lama, birokrasi yang berbelit-belit, dan pelayanan yang tidak ramah. Akibat keterbatasan dana dan persyaratan kredit yang memberatkan bagi sebagian petani, sehingga tidak seluruh petani bisa mendapatkan kredit dari program pemerintah tersebut. Petani yang tidak memperoleh kredit, mengandalkan sumber pembiayaan produksi dari modal pinjaman ke tetangga atau tengkulak/rentenir dengan bunga yang lebih tinggi. Akibatnya akan merugikan petani karena memperoleh keuntungan yang lebih kecil (Yustika, 2013).

Berangkat dari permasalahan penyebab ketidakberdayaan masyarakat dalam pengolahan sektor pertanian maka pemerintah berupaya untuk menanganinya melalui berbagai program-program pembangunan yang berbasis pemberdayaan perdesaan. Pemerintah melakukan upaya untuk mengatasi persoalan tersebut, melalui Departemen Pertanian Tahun 2008 melaksanakan program dalam bentuk bantuan langsung masyarakat (BLM) yang disebut Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan fasilitas bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, penggarap buruh tani maupun rumah tangga tani, hal ini merupakan upaya untuk

pemberdayaan petani, guna merangsang secara aktif kegiatan agribisnis di pedesaan, dengan pembangunan sektor pertanian yang berbasis potensi sumber daya lokal yang ada di wilayah perdesaan (Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, 2015).

Program PUAP yang merupakan program dari Kementerian Pertanian untuk mengatasi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi kesenjangan pembangunan yang ada antar wilayah pusat dengan daerah serta kesenjangan antar subsektor yang ada. Program PUAP diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 16/Permentan/OT.140/2/2008 tentang PUAP.

Program PUAP berupa pemberian bantuan modal kepada pemilik dan atau petani penggarap skala kecil, petani atau peternak, buruh tani ataupun rumah tangga tani yang penyalurannya melalui Gapoktan selaku sebagai pelaksana program PUAP. Hal ini dilakukan dengan tujuan Gapoktan dapat menjadi lembaga ekonomi yang dipunyai dan dikelola oleh petani. Pemberian dana PUAP diutamakan untuk daerah-daerah yang tertinggal namun yang memiliki potensi pengembangan agribisnis (Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, 2015).

Jenis usaha produktif yang dikembangkan mencakup: kegiatan budidaya (*on-farm*) tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan: dan nonbudidaya (*off-farm*), yakni industri rumah tangga pertanian, pemasaran hasil pertanian skala mikro (bakulan dan lain-lain) dan usaha lain berbasis pertanian (Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, 2015).

Penyaluran dana PUAP difokuskan untuk daerah-daerah yang tertinggal namun memiliki potensi pengembangan agribisnis ke depannya. Berdasarkan kebijakan teknis program PUAP, sebaran lokasi PUAP meliputi 33 propinsi, 379

Kabupaten atau Kota, 1834 Kecamatan miskin dan 10524 Desa miskin. Salah satu provinsi yang memperoleh PUAP adalah Provinsi Jawa Timur.

Jawa Timur memiliki peran yang cukup besar terhadap perekonomian nasional, di mana sebesar 14,67% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia merupakan kontribusi dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jatim. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi di Jatim pada triwulan I-2018 bila dibandingkan triwulan I-2017 tumbuh sebesar 5,5%, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,37%. Adapun tiga sektor ekonomi utama yang mendukung Provinsi Jatim, yaitu sektor industri pengolahan 29%, sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan motor sebesar 18%, dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 13% (Wartaekonomi.co.id., 2018).

Pertumbuhan ekonomi harusnya mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat, namun pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Timur tersebut kelihatan tidak merata antar sektor. Sektor pertanian masih memiliki peringkat terendah dalam tingkat pertumbuhan, dibandingkan dengan pertumbuhan dari sektor-sektor lainnya yaitu 1,81% dan mengalami perlambatan hingga 0,26% pada tahun 2019 (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2019b).

Salah satu daerah yang melaksanakan program PUAP adalah Kabupaten Pamekasan Madura. Kabupaten pamekasan merupakan daerah yang memiliki potensi pertanian cukup tinggi yang ditunjang dengan adanya modal atau prasarana dasar berupa lahan pertanian yang luas sehingga menjadikan Kabupaten Pamekasan sebagai salah satu daerah penyangga pangan di Jawa Timur.

Dilihat dari topografi, maka Kabupaten Pamekasan berada pada ketinggian 6-312 m di atas permukaan air laut (dpl). Wilayah yang terletak di pesisir pantai, seperti Kecamatan Tlanakan, Pademawu, Galis, Larangan, Batumarmar dan Pasean mempunyai ketinggian antara 6-36 m di atas permukaan air laut. Wilayah terendah adalah Kecamatan Galis, yaitu 6 meter dpl. Sedangkan wilayah yang terletak di bagian tengah mempunyai ketinggian antara 77-250 m di atas permukaan air laut, tertinggi adalah Kecamatan Pegantenan dengan ketinggian 312 m diatas permukaan air laut (Pamekasan Dalam Angka 2019).

Penduduk Kabupaten Pamekasan sebagian besar masih tinggal di daerah perdesaan dan pada umumnya masih menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Menurut data PDRB Kabupaten Pamekasan Tahun 2017, sumbangan untuk sektor pertanian adalah 33,77%. Bila dirinci per subsektor akan dapat dilihat bahwa tanaman pangan memegang peranan yang cukup besar, yaitu 8,20%. Subsektor lainnya mempunyai peranan sebagai berikut, hortikultura 1,47%, perkebunan 5,43%, peternakan 7,85%, kehutanan 0,13% dan perikanan 10,41% (BPS Kab. Pamekasan, 2018).

Lahan pertanian di Kabupaten Pamekasan seluas 64.920 Ha atau 81,94% dari total luas wilayah, sedangkan sisanya yaitu 18,06% berupa lahan bukan pertanian. Dari luasan tersebut, 27.61% berupa lahan sawah yang terdiri dari sawah tadah hujan 10.602 Ha dan lahan sawah teknis seluas 7.325 Ha. Sebagian besar lainnya yakni 73.55 % areal pertanian di Kabupaten Pamekasan berupa tegalan, ladang, perkebunan, hutan rakyat dan kolam/tebat/empang (Pamekasan Dalam Angka 2019).

Jenis tanaman pertanian yang umum diusahakan oleh petani di Pamekasan antara lain padi dan jagung dengan luas tanam untuk padi (sawah dan ladang) 28,405 Ha dan luas panen 28,405 Ha. Sedangkan luas tanam tanaman jagung adalah 36,488 Ha dengan luas panen sekitar 36,488 Ha (Kabupaten Pamekasan Dalam Angka 2019). Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Pamekasan tahun 2017 yang dikutip dari publikasi Kabupaten Pamekasan Dalam Angka Tahun 2017, luas panen padi adalah 31.288 Ha dengan total produksi 151.346 Ton yang berarti tingkat produktivitas padi adalah 4,84 Ton/Ha. Produktifitasnya lebih rendah dibandingkan dengan produksi padi pada tahun sebelumnya yaitu 5,20 Ton/Ha, berarti dalam kurun waktu satu tahun mengalami penurunan produktivitas sebesar 0,16 Ton/Ha. Sedangkan untuk sub tanaman bahan makanan jagung, luas panen adalah 38.827 Ha dan total produksinya mencapai 87.668 Ton, berarti produktivitas jagung di Pamekasan tahun 2017 sebesar 2,26 Ton/Ha (BPS Kab. Pamekasan, 2018).

Tingkat produktifitas tanaman padi tertinggi di Kabupaten Pamekasan tahun 2017 adalah Kecamatan Galis yaitu 6,03 Ton/Ha. Sedangkan produktivitas terendah adalah Kecamatan Pegantenan yaitu 4,36 Ton/Ha. Produktivitas tertinggi untuk tanaman jagung adalah di Kecamatan Kadur sebesar 2,94 Ton/Ha. Sedangkan yang terendah di Kecamatan Galis yaitu 0,51 Ton/Ha (BPS Kab. Pamekasan, 2018).

Berdasarkan Indikator Sosial Dan Ekonomi Kabupaten Pamekasan 2015-2018 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan. Seperti tersaji pada Tabel berikut:

Tabel 1.1. Indikator Sosial Dan Ekonomi Kabupaten Pamekasan 2015-2018

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	146.920	142.320	137.770	125.760
Persentase Penduduk Miskin (P0)	Persen	17,41	16,70	16,00	14,47
Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	Poin	3,24	2,38	1,66	1,70
Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)	Poin	0,88	0,54	0,33	0,32
Garis Kemiskinan Perkapita/Bulan	Rupiah	278.093	292.631	302.431	317.144
Gini Ratio	Poin	0,338	0,361	0,334	0,326 ^{*)}
Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan	Persen	82,59	83,30	84,00	85,53
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,32	5,35	5,04 ^{*)}	5,46 ^{**)}
PDRB Perkapita ADHB	Ribu Rupiah	14.549,97	15.837,19	16.964,67 ^{*)}	18.281,56 ^{**)}
Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT	Persen	4,26	ts	3,91	2,92
Produk Domestik Regional Bruto (ADHB)	Milyar Rupiah	12.299,29	13.528,03	14.640,58 ^{*)}	15.941,46 ^{**)}
Upah Minimum Kabupaten	Rupiah	1.210	1.350	1.495	1.588
Jumlah Penduduk	Jiwa	845.314	854.194	863.004	871.497
Jumlah Rumah Tangga	Rumah Tangga	219.028	221.322	223.611	225.811
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	63,10	63,98	64,93	65,41
Indeks Kesehatan	Poin	0,72	0,72	0,72	0,73
Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	66,86	66,95	67,05	67,22
Indeks Pendidikan	Poin	0,56	0,57	0,59	0,59
<i>Expected Years of Schooling</i> (EYS) (Harapan Lama Sekolah)	Tahun	13,34	13,35	13,61	13,62
<i>Mean Years of Schooling</i> (MYS) (Rata-rata Lama Sekolah)	Tahun	5,73	6,08	6,25	6,35
Indeks Daya Beli (PPP)	Poin	0,62	0,63	0,64	0,65
Pengeluaran Perkapita/Tahun	Ribu Rupiah	7.679	7.975	8.311	8.536
Rangking IPM se Jawa Timur	Peringkat	33	34	32	32

Ket: *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

ts = Data tidak tersedia (tahun 2016 survei ketenagakerjaan/Sakernas tdk dilaksanakan akibat adanya pemotongan anggaran oleh pemerintah)

Sumber: Pamekasan dalam Angka (2019)

Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Pamekasan cenderung mengalami *trend* turun walaupun penurunannya relatif kecil. Sebenarnya bila dilihat per subsektor pada indeks Nilai Tukar Petani Kabupaten Pamekasan, ada yang mengalami kenaikan pada dua subsektor yaitu subsektor tanaman pangan dan subsektor tanaman perkebunan rakyat. Sedangkan subsektor hortikultura, subsektor peternakan dan subsektor perikanan mengalami penurunan. Hal ini berpengaruh pada penurunan indeks Nilai Tukar Petani secara gabungan, karena peranan subsektor yang mengalami penurunan relatif lebih besar. Penurunan ini mempunyai arti bahwa dari waktu ke waktu selama tahun 2017, kecepatan rata-rata kenaikan harga barang-barang yang dihasilkan petani, masih

dibawah dari kecepatan rata-rata kenaikan harga barang dan jasa konsumsi rumah tangga dan biaya produksi yang dibayarkan petani. Namun demikian, semua subsektor dalam Nilai Tukar Petani Kabupaten Pamekasan mempunyai besaran diatas 100, artinya secara umum tingkat kesejahteraan petani lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun dasar yaitu tahun 2012 sebagai diagram timbang (BPS Kab. Pamekasan, 2018).

Kecamatan Galis merupakan daerah penghasil pertanian terbesar di Kabupaten Pamekasan, sehingga sangat sesuai untuk pengembangan sektor pertanian. Berdasarkan keadaan geografisnya, Kecamatan Galis merupakan daerah yang kering. Dengan keadaan tersebut, sangat cocok apabila di Kecamatan Galis dijadikan tempat dalam bercocok tanam karena tanaman tersebut memang cocok untuk tanah yang kering. Berdasarkan luas panen, produksi dan produktivitas tanaman padi dan palawija di Kecamatan Galis diketahui bahwa padi sawah memiliki luas panen 95.00 Ha menghasilkan produksi 5.27 Kw dan produktivitas sebesar 0,06 Kw/Ha; padi ladang dengan luas panen 17.00 Ha menghasilkan produksi 7.90 Kw dan produktivitas sebesar 0,46 Kw/Ha; jagung dengan luas panen 32.00 Ha menghasilkan produksi 1.01 Kw dan produktivitas sebesar 0,03 Kw/Ha (Kecamatan Galis Dalam Angka 2019).

Berdasarkan tiga terbesar tanaman sayuran diketahui bahwa bawang merah dengan luas panen 14.00 Ha menghasilkan produksi 980.00 Kw dan produktivitas sebesar 70.00 Kw/Ha, cabe merah dengan luas panen 1.00 Ha menghasilkan produksi 50.00 Kw dan produktivitas sebesar 50.00 Kw/Ha, dan cabe rawit dengan luas panen 2.00 Ha menghasilkan produksi 10.00 Kw dan produktivitas sebesar 5.00 Kw/Ha. Berdasarkan perkebunan diketahui bahwa

produksi kelapa sebesar 1,849.00 Kw, kapuk randu sebesar 10.00 Kw, Asam Jawa sebesar 70.00, dan Tembakau sebesar 7,411.88 (Kecamatan Galis Dalam Angka 2019).

Hasil panen di atas menunjukkan adanya ketimpangan produksi maupun produktivitas, baik dari tanaman padi, palawija maupun perkebunan. Sementara berdasarkan kelompok tani dan anggota kelompok tani, Kecamatan Galis merupakan terkecil dibandingkan kecamatan yang lain yaitu 41 kelompok tani dari total 1,019 kelompok tani, sedangkan terbanyak adalah Kecamatan Proppo sebanyak 124 kelompok tani (Kecamatan Galis Dalam Angka 2019).

Salah satu desa yang mendapatkan BLM PUAP di Kecamatan Galis adalah Desa Polagan. Desa Polagan merupakan salah satu desa di Kecamatan Galis yang sangat berpotensi dalam mengembangkan usahatani dilihat dari luas lahan terbesar dari sebelas desa yang ada di Kecamatan Galis, yaitu lahan pertanian sebesar 425.00 Ha dari total lahan pertanian 1,578.00 Ha. Luas lahan pertanian sawah juga terbesar dibandingkan desa yang lain yaitu 229.00 Ha (Kecamatan Galis Dalam Angka 2019). Namun keterbatasan modal menjadi salah satu persoalan petani di Desa Polagan. Kondisi tersebut peran PUAP sangat vital dibutuhkan para petani di Desa Polagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Melihat tingginya potensi sektor pertanian di Desa Polagan, Kecamatan Galis maka untuk lebih mengembangkan sektor agribisnis di desa tersebut ini, pemerintah Kabupaten Pamekasan memilih Desa Polagan sebagai salah satu desa yang menjadi sasaran penerima Bantuan Langsung Masyarakat PUAP. Dalam realisasinya, BLM PUAP diberikan kepada masyarakat petani melalui Gapoktan. Pengelompokan petani ke dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) merupakan salah satu strategi

pemberdayaan masyarakat melalui PUAP. Strategi ini menempatkan rakyat sebagai pusat utama sehingga dapat meningkatkan kemandirian masyarakat.

Hasil wawancara dengan Ketua Gapoktan Desa Polagan diketahui bahwa di Desa Polagan terdapat 8 Kelompok Tani tetapi yang mendapatkan SK Bupati berjumlah 7 Kelompok Tani. Dari 7 Kelompok Tani jumlah anggota sebesar 547 orang, yang didirikan pada tanggal 5 Maret 2008 dengan diberi nama Gapoktan “Arjuna”. Di Kecamatan Galis yang tidak menerima dana PUAP hanya Desa Ponteh. Gapoktan Desa Polagan jika sudah berjalan dua tahun, harus mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis. Jadi, sepertiga dijalankan oleh LKMA, lalu sisa dikelola oleh gapoktan. Jadi 65% bayarannya itu satu tahun 2x, caranya meminjamkan kepada kelompok tani, poktan itu 6%, dari poktan ke anggotanya 10%. Bayarannya yang dikelola gapoktan tiap-tiap 6 bulan. Intinya, dana dipinjamkan kepada poktan, poktan itu kesetiap anggotanya. Karena PUAP itu dananya terbatas, jadi tidak semuanya dapat memenuhi modal usaha petani khususnya di anggota. Tapi untuk merangsang, contohnya satu kelompok tani jumlahnya 50 orang, dan kelompok tani tersebut mendapat 10 juta jika dibagi 50 orang hanya sedikit (Hasil Wawancara, Ketua Gapoktan “Arjuna”, 13 November 2019).

Hasil wawancara di atas memberikan gambaran bahwa pelaksanaan PUAP di Desa Polagan belum berjalan maksimal. Hal ini karena indikator keberhasilan PUAP tidak hanya penyaluran dana namun juga berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat. Hasil pengamatan diketahui tingkat kesejahteraan anggota Poktan tidak merata karena tidak semua mampu mengembangkan kemampuan meningkatkan aktivitas kegiatan usaha dari tradisional ke arah agribisnis. Artinya, ada petani yang dapat berkembang

usahnya karena mampu mengembangkan beberapa komoditi, ada pula yang hanya satu komoditi, misal padi saja. Hal ini dibuktikan dengan hasil pendapatan petani yang tidak merata. Misal, Bapak Astro yang memiliki luas lahan sebesar 2500m², memperoleh pendapatan sebesar 7 juta, dengan komoditi padi dan tembakau. Bapak Busri yang memiliki luas lahan sebesar ½ hektar, memperoleh pendapatan sebesar 10 juta, dengan komoditi padi, tembakau, dan jagung. Berbeda dengan Bapak Sukardi yang memiliki luas lahan sebesar 4000m², memperoleh pendapatan sebesar 15 juta, hanya dengan komoditi padi dan bawang merah. Kondisi tersebut dikarenakan para petani anggota Poktan umumnya menambah modal dari modal sendiri misalnya dari keuntungan hasil panen sebelumnya, dana PUAP yang diperoleh biasanya digunakan hanya cukup untuk membeli pupuk dan bibit.

Fakta di atas menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara tujuan Program PUAP dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani yang tergabung dalam anggota Poktan. Hubungan Program PUAP dengan kesejahteraan anggota kelompok tani didukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Darwis (2014) menyatakan bahwa pemberdayaan yang telah dilakukan oleh dinas pertanian melalui program PUAP berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok tani Desa Tanjung Tebat Kecamatan Bunga Mas Bengkulu Selatan. Pemberdayaan pengembangan usaha agribisnis pedesaan berjalan dengan baik sesuai dengan indikator keberhasilan kerja sesuai pada tahapan proses pemberdayaan 80% para informan dapat mengembangkan usahanya dengan baik. Hasil serupa dilakukan Hermawan dan Hendayana (2015) bahwa peran BLM PUAP di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara mampu meningkatkan produktivitas, nilai tambah, daya saing

dan ekspor produk pertanian, bahkan pada kegiatan usaha tani yang dilakukan petani mampu memberikan pendapatan yang lebih menguntungkan. Sejalan dengan hasil penelitian Suandi, dkk. (2012) bahwa program PUAP melalui manajemen sumberdaya Gapoktan berpengaruh positif sangat nyata terhadap peningkatan kesejahteraan petani Desa Tunas Mudo, Pematang Pulau, dan Desa Berembang Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Hal ini mengindikasikan bahwa program PUAP sangat berperan terhadap peningkatan kesejahteraan petani namun perlu dikelola secara intensif dan profesional berbasis sumberdaya lokal.

Berdasarkan seluruh uraian di atas maka pada penelitian ini peneliti mengambil judul **“Peran PUAP Terhadap Kesejahteraan Petani di Desa Polagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Desa Polagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tingkat kesejahteraan petani di Desa Polagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana peran Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) terhadap kesejahteraan petani di Desa Polagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Desa Polagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan petani di Desa Polagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk menganalisis peran Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) terhadap kesejahteraan petani di Desa Polagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sarana informasi kepada masyarakat untuk dapat mengetahui lembaga yang lebih baik untuk mengambil pinjaman untuk modal usaha tani.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan referensi bagi para akademisi dan juga dapat menjadi landasan perbandingan dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang

3. Manfaat Bagi Peneliti

Dapat memperdalam ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk belajar berpikir ilmiah (skeptis, analisis, dan kritis), terutama sebuah pemahaman tentang peran PUAP terhadap kesejahteraan masyarakat, serta sebagai penerapan dari teori-teori yang telah didapat di perkuliahan.